

**POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI
CILEUNGSI AKIBAT LIMBAH PABRIK**

Maulana Rizky Pristyanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas *political will* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam mempercepat penanganan pencemaran Sungai Cileungsi yang disebabkan oleh limbah pabrik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Penelitian ini menggunakan konsep *political will* Brinkerhoff sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan beberapa konsep politik lingkungan, *environmental justice*, dan oligarki sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor penghambat penanganan pencemaran Sungai Cileungsi yaitu aktivitas pembuangan limbah oleh oknum pabrik, keberadaan pipa *bypass* oleh para oknum perusahaan, dan relasi kuasa yang terjalin antara bisnis dan politik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah memiliki kemauan politik yang cukup baik apabila dikaitkan dengan konsep *political will* oleh Brinkenhoff. Sepanjang tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah memberikan sanksi administratif kepada 20 perusahaan dan 3 sanksi hukum berupa pencabutan izin usaha kepada industri lain. Implikasi penelitian ini yaitu memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa DLH Kabupaten Bogor telah memiliki kemauan politik untuk menangani pencemaran Sungai Cileungsi. Selain itu, mampu mengungkap adanya relasi kuasa yang terjalin antara bisnis dan politik yang menjadi faktor penghambar dalam menangani kasus pencemaran Sungai Cileungsi.

Kata Kunci: Pencemaran Sungai Cileungsi, Kemauan Politik, Relasi Kuasa, dan Limbah Pabrik

THE POLITICAL WILL OF THE BOGOR REGENCY GOVERNMENT IN ADDRESSING POLLUTION IN THE CILEUNGSI RIVER DUE TO FACTORY WASTE

Maulana Rizky Pristyanto

ABSTRACT

This research aims to discuss the political will of the Bogor Regency Government, particularly the Environmental Agency of Bogor Regency, in accelerating the handling of pollution in the Cileunsgsi River caused by factory waste. This study also aims to reveal the power relations that hinder the handling of pollution in the Cileunsgsi River. The research uses Brinkerhoff's concept of political will as the grand theory. Additionally, it incorporates several concepts from environmental politics, environmental justice, and oligarchy as analytical tools. The study employs a descriptive qualitative research method, using primary data obtained through in-depth interviews and secondary data obtained through documentation studies. The research uses purposive sampling techniques to determine the informants. The findings of this study indicate three main factors that hinder the handling of Cileunsgsi River pollution: waste disposal activities by certain factory officials, the existence of bypass pipes by company officials, and the power relations between business and politics. The Bogor Regency Environmental Agency has shown a relatively strong political will when linked to Brinkerhoff's concept of political will. Throughout 2023, the Environmental Agency of Bogor Regency imposed administrative sanctions on 20 companies and three legal sanctions in business license revocations on other industries. The implication of this research is to clarify to the public that the Environmental Agency of Bogor Regency has demonstrated political will in addressing the pollution of the Cileunsgsi River. Furthermore, it can uncover the power relations between business and politics that hinder handling the Cileunsgsi River pollution cases.

Keywords: *Pollution of Cileunsgsi River, Political Will, Power Relations, and Factory Waste*